

# Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

## Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

### Artikel

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

*Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto*

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

*Ida Ruwaida*

Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

*Mary Austin*

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

*Diah Irawaty*

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

*Purnama Sari Pelupessy*

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

*Sargini, Jumiyem, Muryanti*

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

*Maria Ulfah Anshor*

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

*Anita Dhewy*

### Wawancara

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi"

*Abby Gina*

### Kata Makna

*Nur Iman Subono*

### Profil

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

*Andi Misbahul Pratiwi*

### Resensi Buku

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia

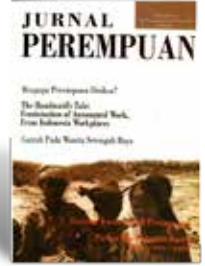
*Naufaludin Ismail*

Diterbitkan oleh:

## Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

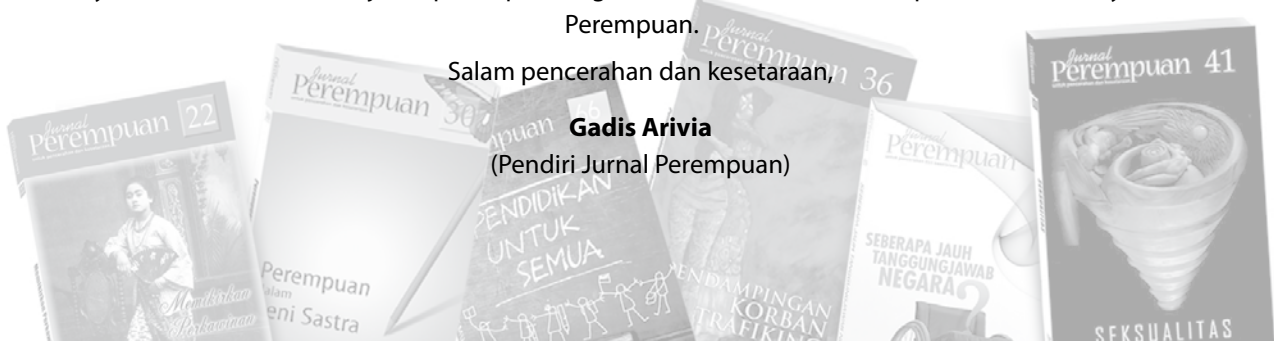
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu  
Naufaludin Ismail

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Irma Yunita

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Agustus 2017



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran / *Local and Migrant Domestic Workers* ..... iii

### Artikel / Articles

- Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia / *Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers* ..... 179-190  
*Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto*
- Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung / *Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung* ..... 191-200  
*Ida Ruwaida*
- Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia / *Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the Campaign for Domestic Worker Legislation in Indonesia* ..... 201-213  
*Mary Austin*
- Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru / *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era* ..... 215-226  
*Diah Irawaty*
- Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang / *Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting* ..... 227-237  
*Purnama Sari Pelupessy*
- Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya / *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge* ..... 239-247  
*Sargini, Jumiyem, Muryanti*
- Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak / *Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare* ..... 249-260  
*Maria Ulfah Anshor*
- Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT / *Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers* ..... 261-271  
*Anita Dhewy*

### Wawancara / Interview

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi" / *Arum Ratnawati: "Violence against Domestic Workers Caused by the Non-recognition of Domestic Workers as a Profession"* ..... 273-277  
*Abby Gina*

### Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono ..... 279-280

### Profil / Profile

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / *Lita Anggraini: Class Bias Still a Major Barrier in Advocating the Bill on Protection of Domestic Workers* ..... 281-287  
*Andi Misbahul Pratiwi*

### Resensi Buku / Book Review

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia / *The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia*..... 289-294  
*Naufaludin Ismail*

# Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

## *Local and Migrant Domestic Workers*

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh—merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. Pandangan tradisional mengenai pekerjaan rumah tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakan pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis, yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun, sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80 persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita Anggraini Koordinator Nasional Jala-PRT (2017, wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan serius, maka urgensi atas pentingnya payung hukum yang memberikan perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru, upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis Proyek *Promote* ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)



# Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017

## Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto  
(Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

### **Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia**

#### ***Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar  
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint feminism*, agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

### **Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung**

#### ***Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambar,  
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs, but from their employers. The interesting findings is the tendency of double standards among employers when they faced the social aspects of their relations with PRTs will be transformed into economic ones by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic workers should be recognized as worker, like others, and their rights will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic workers is a manifestation of social development, in Indonesian context, the structural intervention through state policy will be conflicted with the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the study indicates that there is a need to develop social process as apart of cultural intervention for building an equal relationship between domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations, economic relations, social development, structural intervention, cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah, dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi, pembangunan sosial, intervensi struktural, intervensi kultural.

---

Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and Oriental Studies, University of London, Inggris)

### **Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasinya Pekerja Rumah Tangga di Indonesia**

#### ***Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the campaign for domestic worker legislation in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37 daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage more Indonesian journalists and media organizations in advocacy journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying Ann Stoler's notion of 'disregard' in the context of post-Suharto democratization, I illustrate how established newsroom practices and patterns of reporting helped maintain distinctions between 'home' and overseas domestic workers which impeded progress towards comprehensive legislation. Indonesia's endorsement of the adoption of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities, provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged journalists to give more space to domestic workers' voices. At the same time, increased media coverage enabled those opposed to legislation to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of domestic work.

Key words: advocacy journalism, domestic workers, Indonesia, disregard, victim narratives

Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang "pengabaian" dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan perbedaan antara pekerja rumah tangga "dalam negeri" dan pekerja rumah tangga "luar negeri" yang menghambat kemajuan undang-undang yang komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kunci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia, pengabaian, narasi korban

---

Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York [SUNY] Binghamton, New York, United States)

### **Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru**

#### ***Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 215-226, 56 daftar pustaka

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime

women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

---

Purnama Sari Pelupesty (Mitra Imadei, Jakarta)

### **Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang**

#### ***Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 227-237, 1 gambar, 3 tabel, 17 daftar pustaka

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai community organizer. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan

negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

---

Sargini, Jumiyem, Muryanti (Serikat Pekerja Rumah Tangga [SPRT] Tunas Mulia, Yogyakarta, Indonesia)

### **Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya**

#### ***Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 239-247, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

---

Maria Ulfah Anshor (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], Jakarta, Indonesia)

### **Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak**

#### ***Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 249-260, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam blue print kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak

---

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT**

#### ***Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 261-271, 15 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of domestic workers who experience violence, discrimination and neglect of rights committed by employers as well as management of apartments where domestic workers work. From the data of six domestic workers with diverse backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that

every domestic worker has experienced violence during work. There are forms of violence that can be easily recognized as violence, but there is also some discrimination and violence that are not viewed as violence or are considered fairness. This type of discrimination and violence is usually associated with inappropriate work situations. The vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope of their work in this private domain is an implication of the absence of laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore, the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap sebagai kewajiban. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan PRT

## Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

### *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era*

**Diah Irawaty**

Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY) Binghamton,  
New York, United States  
4400 Vestal Parkway East, Binghamton, NY 13902, USA

iradiah@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 26 Juni 2017, direvisi 20 Juli 2017, diputuskan diterima 31 Juli 2017

#### Abstract

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

#### Abstrak

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (*ideal women*), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

#### **Pendahuluan: Kerangka Konsep Politik-Ekonomi Global**

Sejarawan Laurie Sears (1996) dalam Pendahuluan buku fenomenal yang dieditnya *Fantasizing the Feminine in Indonesia* mengkritik keras laporan *The New York Times* yang terbit pada September 1993 tentang membludaknya buruh murah di Indonesia yang justru mengabaikan pembahasan tentang buruh perempuan. Nyatanya, buruh perempuan, termasuk pekerja rumah tangga, adalah sisi paling nyata dari wajah buruh murah di Indonesia. Kritik Sears mengingatkan kita betapa perempuan acapkali dilupakan dalam banyak analisis dan agenda pembangunan di hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia. Pekerja rumah tangga mengalami peminggiran nilai kerja dan pasar secara berlipat. Pandangan sebagai pekerjaan informal dan feminisasi

kerja domestik menjadi faktor signifikan di balik devaluasi kerja buruh rumah tangga ini. Feminisasi menaturalisasi pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan perempuan, semua perempuan secara natural bisa melakukannya, menjadi bagian inheren hidup perempuan, dan merupakan pekerjaan mudah yang tidak butuh keahlian dan training. Pada akhirnya, penilaian bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan buruh rumah tangga ini merupakan *unskilled labor* menjadi legitimasi kuat untuk memarginalkan buruh perempuan dalam analisis pembangunan dan perburuhan. Menurut Phillips dan Taylor (1980) status *unskilled* pada pekerjaan yang dianggap pekerjaan perempuan merupakan label politik yang diterapkan atas dasar kategori ideologi dan bias seksual yang jelas dipengaruhi relasi patriarki yang menempatkan pekerjaan perempuan pada posisi rendah.

Sementara Pateman (1988) berpendapat, pembagian kerja secara seksual menciptakan segregasi pekerjaan berdasarkan gender dan feminisasi pekerjaan rumah tangga yang mengakibatkan devaluasi terhadap jenis pekerjaan ini. Akhirnya, meski mengalami komodifikasi, pekerjaan ini tetap dianggap bernilai sosial-ekonomi rendah dan "the dirty work" (Anderson 2000).

Tempat kerja pekerja rumah tangga yang berada di rumah yang dikonotasikan sebagai domain privat sering menjadi dasar menilai pekerjaan rumah tangga bukan sebagai pekerjaan yang sesungguhnya (*real work*) (Romero 1992; Anggraeni 2006; Irawaty 2011). Akibatnya, hak-hak kerja pekerja rumah tangga bisa diabaikan begitu saja; bahkan "mereka tidak mempunyai akses terhadap sistem legal yang mengatur semua pekerjaan dan sistem dukungan sosial di mana mereka mempunyai hak atasnya" (Irawaty 2011, h. 45). Agenda developmentalisme, industrialisasi dan globalisasi mendorong pekerjaan rumah tangga mengalami transformasi hingga menjadi pekerjaan global. Tetapi perkembangan ini tidak serta merta mentransformasi pekerjaan ini dan para pekerjanya sebagai pekerjaan yang memiliki nilai sosial-ekonomi. Akhirnya, kita mudah menjumpai situasi kontradiktif yakni pekerja migran termasuk pekerja rumah tangga dielut-elukan sebagai pahlawan devisa, tapi mereka tidak diakui sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi hak-haknya sebagai pekerja. Di sini kita juga bisa melihat sebuah paradoks yakni perempuan "dituntut" untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan negara tetapi mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan bahkan tidak menjadi subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan perburuhan.

Terutama pada masa Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan politik ekonomi pembangunan yang menasar perempuan untuk dilibatkan dalam pasar tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan buruh murah. Stereotip perempuan sebagai penurut, patuh, cermat, teliti, rajin, tidak menuntut dan mengeluh dimanipulasi untuk mendorong (atau memaksa) mereka menjadi pekerja baik sebagai buruh pabrik ataupun sebagai pekerja rumah tangga yang memang sedang sangat dibutuhkan akibat berbagai agenda developmentalisme global. Banyak perempuan dari keluarga kelas menengah atas mengambil keuntungan dari pembagian kerja secara internasional (*international division of reproductive labor*) (Parens 2001) dan feminisasi pekerja rumah tangga dengan mempekerjakan mereka sebagai buruh murah, pekerja yang penurut dan *caring*, yang bisa diperlakukan seolah-olah sebagai bagian dari keluarga (*fake kinship*) (Enloe 1990; Anderson 2000; Irawaty 2011). Sesungguhnya

pandangan tersebut menyembunyikan kondisi kerja mereka yang buruk, penuh eksploitasi, bergaji murah, harus selalu siap sedia selama 24 jam tanpa kejelasan batas sebagai pekerja dan hubungan kerjanya dengan majikan (*employer*). Namun demikian, pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan bukanlah melulu korban/victim; mereka juga mempunyai *agency* baik secara individu maupun kolektif yang bisa menunjukkan bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk melakukan resistensi, negosiasi dan pemberdayaan diri (Lan 2006; Enloe 1990; Constable 2007).

Lan (2006) mengkaji migrasi perempuan dari Filipina dan Indonesia dengan analisis globalisasi yang menunjukkan bahwa migrasi perempuan ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga merupakan hasil dari pola regional. Sejak tahun 1970, negara-negara di Asia Timur dan di kawasan Teluk mengalami kemajuan pesat dalam hal kesejahteraan ekonomi dan taraf hidup warganya. Situasi ini membuka kebutuhan pada pekerja di sektor rumah tangga, dan buruh migran perempuan menjadi jawaban utama bagi kebutuhan tersebut. Dalam konteks global, pekerjaan rumah tangga selalu dikaitkan dengan kapitalisme, globalisasi dan developmentalisme. Constable (2007) menekankan pentingnya melihat diskursus pekerjaan rumah tangga ini secara historis, lokal dan kontekstual dalam kerangka kapitalisme global. Menurutnya, dalam konteks Filipina, misalnya, kolonialisme, neokolonialisme, korupsi, dan pengangguran memainkan peran penting yang menjadikan Filipina sebagai negara pengekspor pekerja rumah tangga terbesar. Filipina mengembangkan kebijakan ekspor buruh sejak pemerintahan Marcos pada tahun 1970-an untuk mengatasi persoalan pengangguran. Di sisi lain, di negara-negara maju baru di Asia seperti Hong Kong mengalami kekurangan tenaga kerja. Ekonomi Hong Kong yang mengalami pertumbuhan pesat memberikan perempuan Hong Kong kesempatan untuk bekerja di pasar tenaga kerja yang biasa dilakukan oleh mayoritas laki-laki. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak dapat mengerjakan apa yang disebut Hochschild & Machung (1989) *the second shift*, pekerjaan-pekerjaan di rumah atau pekerjaan rumah tangga. Dalam analisis saya, di bawah norma patriarki, mereka perlu bernegosiasi (*patriarchal bargain*) agar mereka bisa bekerja tanpa menelantarkan anak-anak dan keluarga. Mereka perlu mempekerjakan perempuan lain yang kurang beruntung dan secara ekonomi lebih rendah yang lebih banyak "tersedia" di negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, dll.

Hal menarik terjadi dalam konteks Indonesia pada masa Orde Baru. Sebagai respons terhadap migrasi perempuan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di beberapa negara di Timur Tengah dan Asia, pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan yang sesungguhnya kontradiktif. Di satu sisi, Soeharto menerapkan ideologi gender yang dikenal sebagai *state ibuism* (Suryakusuma 1996), pelembagaan peran gender tradisional yang dualistis dan oposisi biner yang mendomestikasi perempuan dan memberi peran pencari nafkah pada suami. Perempuan baik selalu digambarkan sebagai perempuan domestik yang beraktivitas di rumah mengurus kebutuhan keluarga dan patuh pada suami. Mereka adalah pilar negara. Sementara, perempuan yang tidak baik digambarkan sebagai perempuan yang beraktivitas di publik, berkarier di luar rumah, menelantarkan suami dan anak-anak dan terlibat dalam politik. Mereka merupakan ancaman bagi negara. Pemerintah menjalankan ideologi *state ibuism* atau maternalisme yang menggabungkan elemen ekonomi, politik dan budaya yang berasal dari konsep dan praktik borjuis Jawa dan *housewifization* (Suryakusuma 1996).

Di sisi lain, Soeharto mengaplikasikan politik pembangunan ekonomi dengan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pasar tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan nasional dan internasional terhadap buruh murah dan sebagai penghasil devisa negara. Pemerintah mendorong perempuan bermigrasi, baik nasional maupun internasional, sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi mereka pada ekonomi negara. Kita bisa melihat bahwa pekerja rumah tangga perempuan dijebak di antara kontradiksi politik gender dan politik developmentalisme rezim Orde Baru yang menerapkan dua bentuk politik gender yang berbeda dan kontradiktif satu sama lain. Dalam tulisan ini, saya ingin mendiskusikan dua pertanyaan berikut, terkait kontradiksi politik gender Orde Baru yang diterapkan terhadap pekerja rumah tangga: (1) Bagaimana ideologi dan politik gender negara dan politik developmentalisme yang diterapkan pada pekerja rumah tangga saling berkontradiksi? (2) Bagaimana politik gender memberikan implikasi yang berbeda bagi pekerja rumah tangga migran perempuan di tempat kerja?

### **Politik Gender dan Proyek Nasionalisme**

Hubungan negara dan perempuan kerap kali merupakan hubungan yang rumit. Perempuan menjadi bagian integral dari agenda *nation-state building* dan proyek nasionalisme. Tubuh perempuan menjadi subjek dan target pembentukan identitas nasional. Relasi gender

digunakan sebagai aspek penting untuk mengkonstruksi dan menciptakan "*imagined communities*" dengan memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang berbeda. Salah satu konsep yang berkaitan dengan nasionalisme adalah *motherhood* atau maternalisme. Dalam diskursus nasionalisme, *motherhood* dimanipulasi dengan menekankan keterlibatan dan kontribusi perempuan dilihat dan ditulis melalui peran mereka sebagai ibu. Identitas diri perempuan harus sejalan dengan proyek nasionalisme dan developmentalisme yang dibuat negara (Anderson 1991; Enloe 1990; Korteweg & Yurdakul 2014; Yuval-Davis 1997; Pateman 1988; Ahall 2012). Anthias dan Yuval-Davis (1989, h. 7) membahas beberapa keterkaitan peran perempuan dengan proyek konsolidasi negara-bangsa, yaitu: 1) peran reproduktif sebagai "sumber utama" keberlangsungan generasi bangsa, 2) peran reproduktif sebagai produser batas rasial di antara kelompok etnis sebagai pembeda utama secara biologis dan ras sebuah bangsa, 3) peran etno-nasionalisme sebagai penanda bagi perbedaan kelompok-kelompok etnis, dan 4) sebagai partisipan dalam perjuangan ekonomi, politik, dan pertahanan nasional.

Pemerintahan Orde Baru mengaplikasikan politik gender untuk konsolidasi kekuasaan melalui *state ibuism* atau *state motherism*, mengkonstruksi peran perempuan sebagai perpanjangan tangan dan pendamping suami, pendidik anak-anak, ibu rumah tangga, dan bagian dari anggota keluarga besar masyarakat Indonesia (Suryakusuma 1996). Negara memainkan peran penting dalam mendefinisikan gender (dan seksualitas), dan menghubungkannya dengan proyek nasionalisme dan agenda pembangunan. Soeharto membuat narasi resmi (*official narrative*) tentang bagaimana menjadi perempuan/istri/ibu yang baik dan yang tidak baik. Inilah bagian dari upaya Soeharto menerapkan ideologi gender negara (Blackburn 2004, h. 9). Konsep kodrat menjadi retorika dan logika pemerintah mengenai "istri dan ibu yang ideal" untuk menjalankan tugas-tugas pembangunan yang diberikan pemerintah untuk mendukung suami, mengurus dan membesarkan anak-anak agar menjadi warganegara yang baik (Blackburn 2004; Suryakusuma 1996). Ideologi gender negara diinternalisasi menjadi bagian dari tugas dan karakter (*nature*) perempuan agar sesuai dengan proses pembangunan nasional. Negara acapkali mendapatkan dukungan politik dari kelompok-kelompok agama terutama kelompok Muslim yang mempunyai pandangan dan interpretasi tradisional tentang ajaran-ajaran Islam, seperti pernikahan dan hubungan keluarga (Blackburn 2004; Robinson 2008).

Menurut Martyn (2005), seksualitas dan peran gender perempuan dilihat sebagai aspek vital dalam mendefinisikan siapa yang bisa dieksklusi dari proses bernegara-bangsa, yaitu mereka yang tidak mengikuti narasi formal yang direproduksi negara. Ideologi gender negara mengkonstruksi konsep dan nilai *motherhood* (*ibuism*) dan tugas-tugas perempuan (*wifely tasks*), atau *housewifization*/pengiburumahtangaan dalam konsep Mies (1982; 1998), memproduksi ekspektasi sosial tentang bagaimana perempuan seharusnya bertingkah laku dan bersikap dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan. Pekerjaan yang diasosiasikan dengan pekerjaan perempuan dianggap tidak bernilai pasar, hanya merupakan pekerjaan subsisten yang tidak sesuai dan relevan dengan pasar. Mies (1982) mengenalkan *housewifization of labor* dan menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan segregasi dan subordinasi manusia atas dasar pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (*sexual division of labor*) yang terjadi sejak masa kolonialisme, kapitalisme dan industrialisasi di negara-negara dunia ketiga. Mies (1998) percaya, pembangunan ekonomi dunia kapitalis tergantung pada pembagian kerja secara internasional dan seksual. Konsep ini penting untuk menganalisis devaluasi pekerjaan rumah tangga yang dilakukan perempuan. Konsep yang dikenalkan Mies juga berguna untuk melihat ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial antara Dunia Selatan (Global South) dan Dunia Utara (Global North). Mies (1998) menggunakan konsep pembagian kerja internasional (*International Division of Labor/IDL*) untuk memahami segregasi struktural, hubungan vertikal antara kekuasaan kolonial dan negara (bekas) koloni.

Lebih jauh, konsep Mies bisa diaplikasikan untuk melihat manipulasi pada hal-hal yang disebut sebagai kodrat perempuan, mengkonstruksi pekerjaan reproduktif dan domestik sebagai pekerjaan inheren perempuan untuk menguntungkan dunia patriarki (lihat juga Enloe 1990). Dengan IDL, kita bisa memahami mengapa buruh perempuan dari negara-negara berkembang baik secara ekonomi dan politik tidak mempunyai nilai pasar yang tinggi sehingga selalu dikategorikan buruh murah. Parrenas (2015) menunjukkan pemikiran yang sama bahwa perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga terlibat dalam pembagian pekerjaan reproduktif internasional (*international division of reproductive labor*) yakni perempuan "kulit berwarna" (*women of color*) dan perempuan kelas pekerja (*working class women*) menjadi komoditas perempuan kelas menengah-atas yang dapat membeli dan menggunakan jasa mereka dengan upah rendah. Menurut saya, perempuan majikan dari kelas menengah-

atas dari negara maju bahkan bisa "mengeksplotasi" para perempuan kelas pekerja dari negara-negara berkembang, seperti Filipina, Bangladesh, Srilanka dan bahkan Indonesia. Konsep IDL dan pembagian kerja reproduktif internasional berjalan bersamaan dengan pelabelan stereotip perempuan sebagai buruh murah, perempuan patuh, tidak menuntut, penurut, dan *nrimo*. Perempuan dianggap sebagai sumber daya alami yang dapat dieksploitasi sebagai properti bagi para kapitalis dan patriarki (Boserup 1970; Anderson 2000). Inilah yang menjadi salah satu sumber devaluasi, diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi pekerja rumah tangga (Enloe 1990; Boserup 1970; Parrenas 2015; Lim & Oishi 1996; Yamanaka & Piper 2005).

Sejak pemerintah Orde Baru mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, negara mengklaim telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beremansipasi dan pemberdayaan dengan menyediakan pekerjaan bagi mereka, mandiri sebagai pencari nafkah atau *cash earners* dan "perempuan karier". Rezim Orde Baru memproduksi diskursus tentang peran perempuan dalam pembangunan sebagai bagian dari mobilisasi dan kontrol terhadap perempuan, termasuk keterlibatan mereka dalam berbagai asosiasi atau organisasi. Soeharto mengkonstruksi ideologi *motherhood* (sebagai ibu) dan *wifedom* (sebagai istri) sebagai peran dan tugas utama perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan *nation-state building*. Soeharto mempropagandakan konsep keluarga inti (*nuclear families*) dan *motherhood* berbarengan dengan konsep kodrat perempuan sebagai ibu dan istri (Blackwood 2005).

Negara menerapkan determinisme biologis (*biological determinism*) dan esensialisme perempuan untuk membangun pandangan natural tentang peran perempuan karena perbedaan anatomi dan fungsi sebagai ibu dan istri dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Determinisme biologi memberikan efek pada devaluasi pekerjaan perempuan dengan asumsi bahwa secara natural, pekerjaan rumah tangga merupakan bagian inheren dalam tubuh dan hidup perempuan. Dengan demikian, pekerja rumah tangga mengalami feminisasi. Negara menciptakan homogenisasi sikap apolitis tentang bagaimana masyarakat berhubungan dengan negara dengan membuat *official narrative* yang harus dipatuhi semua warga negara. Saya melihat ada kontradiksi konsep dan praktik politik Orde Baru. Di satu sisi, negara menerapkan ideologi gender dengan mempropagandakan norma tradisional gender tentang nilai dan konsep ibu dan istri yang baik, yang selalu

bertanggung jawab atas urusan domestik. Pada sisi lain, negara menciptakan kebijakan untuk mendorong dan membuka kesempatan bagi partisipasi perempuan seluas-luasnya dalam pembangunan sebagai bagian dari kontribusi mereka dalam *nation-state building*, dalam hal ini, dengan bersedia menjadi buruh murah.

Grijns (1987) berpendapat, pemikiran dan konsep tentang perempuan dan laki-laki menjadi bagian dari ideologi dalam masyarakat dan negara tertentu dan menerangkan bahwa integrasi perempuan Indonesia dalam program-program pembangunan pemerintah diharapkan menjadi *secondary role* atau hal kedua setelah tugas mereka sebagai istri dan ibu. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan, perempuan harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga di rumah. Menurut saya, hal ini kemudian dijadikan alasan untuk memberikan perempuan apa yang disebut Hochschild dan Machung (2012) "*the second shift*" atau *multiple burdens* sebagai anggota masyarakat, warga negara, istri, ibu, anak dan pekerja bila mereka bekerja. Mereka harus menjadi "*all in one*," menyeimbangkan peran-peran mereka tersebut dan harus bertanggung jawab bila sesuatu terjadi dalam keluarga, masyarakat dan bahkan dalam negara.

Situasi yang disebut di atas tidak bisa diterapkan terhadap perempuan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga karena mereka dihadapkan pada pengalaman keluarga transnasional (*transnational families*), keterpisahan dari keluarga mereka yang membuat mereka tidak dapat memenuhi peran ganda perempuan. Sementara negara mendeskripsikan mereka sebagai pahlawan nasional atau devisa meski tidak memberikan perlindungan terhadap mereka sebagai pekerja baik di negeri sendiri maupun di negeri mereka bekerja. Kontradiksi ini penting untuk diangkat untuk melihat bagaimana "kewajiban" peran ganda perempuan atas dasar ideologi gender tradisional negara tidak berlaku bagi para pekerja rumah demi devisa negara. Perempuan pekerja rumah tangga yang mempunyai anak, biasanya, menyerahkan pengurusan anak mereka pada keluarga dengan "imbalan" kiriman remitansi secara berkala untuk kebutuhan anak-anak mereka dan kebutuhan lain keluarga seperti pembelian alat-alat elektronik, pembangunan atau renovasi rumah, kendaraan, dan lain-lain (Irawaty 2016). Seperti saya sebut sebelumnya, mereka dianggap pahlawan devisa namun stigmatisasi dari masyarakat dan bahkan keluarga sebagai ibu dan istri yang tidak baik sering mereka alami karena mereka meninggalkan keluarga dan anak-anak demi bekerja di luar negeri. Sementara itu negara tidak bertanggung jawab dan lepas tangan terhadap stigma, paradoks dan

dilema yang dihadapi para perempuan pekerja rumah tangga dan membiarkan mereka menghadapinya sendiri. Pertanyaan mendasar yang saya kemukakan adalah mengapa pemerintah tidak ketat menerapkan politik gender maternalisme pada perempuan pekerja rumah tangga dan justru mendorong mereka untuk "menyimpang dan menyalahi" peran dan tugas sebagai istri dan ibu yang baik bagi keluarga, dan perempuan yang baik dalam masyarakat sesuai narasi resmi yang dikonstruksi negara?

Salah satu bentuk politik gender negara juga terlihat jelas ketika negara memproduksi propaganda politik menstigma Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang digambarkan sebagai aktor dalam keterlibatannya dalam pembunuhan tujuh jenderal dalam peristiwa Gerakan September 1965. Gerwani digambarkan sebagai bagian dari dan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Upaya ini untuk menundukkan Gerwani sebagai gerakan perempuan paling progresif di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Jepang. Para anggota Gerwani memperjuangkan persamaan hak-hak buruh bagi para buruh perempuan dengan buruh laki-laki. Mereka juga berjuang melawan poligami dan pengambilalihan lahan oleh pemerintah, aktif dan vokal terhadap isu-isu perempuan bersama kelompok petani/buruh tani dan perempuan urban untuk mendiskusikan kehidupan sehari-hari dan isu-isu perempuan. Mereka juga berupaya dalam program literasi bagi para perempuan, mengimplementasikan reformasi tanah dan bekerja untuk isu-isu kemanusiaan termasuk menjadi pemimpin atau tokoh politik dan publik (Wieringa 1992; 2002; 2003; 2011).

Pemerintah di bawah administrasi Soeharto menganggap gerakan progresif perempuan sebagai ancaman dan teror bagi negara yang seharusnya dibungkam dan ditundukkan agar negara dapat dengan leluasa membuat narasi yang dominan untuk melanggengkan kekuasaannya dan mendapatkan dukungan rakyat agar dapat mengontrol warga negaranya dengan menyeragamkan suara mereka dan menjadikan mereka apolitis, tidak menunjukkan protes, keluhan apalagi kritis dan melawan pemerintah yang akan dengan mudah dilabeli subversif. Tidak ada seorangpun yang dibolehkan untuk mengkonfrontasi kebijakan pemerintah. Suara rakyat haruslah suara pemerintah. Untuk menjaga warga negara hanya punya satu suara, pemerintah melakukan propaganda tentang status, peran dan tugas perempuan agar kekuasaannya tidak terancam dengan memberikan stigma pada Gerwani sebagai bukan perempuan baik-baik. Konsep

Foucault (1995) tentang *governmentality*, *biopolitics* dan *biopower* penting untuk melihat situasi di mana negara seolah-olah mempunyai otoritas dan keleluasaan untuk mengontrol, mendisiplinkan dan “menghukum” warga negaranya yang tidak memenuhi dan mematuhi narasi dan ekspektasi pemerintah. Mereka dilabeli sebagai pelacur, pemberontak, perempuan bengis dan kejam, perempuan nakal, ibu dan istri yang tidak baik sehingga harus dimusnahkan. Inilah yang saya maksudkan sebagai bagian dari propaganda pemerintah dan politik seksual dan gender pemerintah Orde Baru yang berefek pada cara berpikir kita sehingga sangat sulit untuk dihilangkan dan seolah-olah menjadi kebenaran sejarah. Penggambaran negatif tentang Gerwani menjadi narasi sejarah yang dominan. Bagi pemerintah, perempuan boleh berorganisasi tetapi tidak organisasi seperti Gerwani, melainkan yang mendukung peran perempuan sebagai ibu dan istri yang baik dan menjadi perempuan baik-baik, seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai penyambung lidah negara dalam menerapkan ideologi *motherhood* dan *wifehood*.

Wieringa (1992) menjelaskan peran PKK sebagai perpanjangan tangan dan jembatan negara sekaligus menjadi bagian dari negara itu sendiri. PKK mempromosikan ideologi gender negara dan politik seksualitas melalui Panca Dharma Wanita, yaitu sebagai pendamping setia suami, pengelola rumah tangga, pendidik dan penerus generasi bangsa, pencari nafkah tambahan, anggota masyarakat dan warga negara yang bermanfaat. Peran tersebut harus dijalankan sesuai kodrat wanita, yang dikonstruksi negara sebagai istri yang patuh, mengabdikan kepada suami, ibu yang baik, dan anak perempuan yang penurut (Wieringa 1992). Perempuan tidak seharusnya menjadi perempuan nakal, aktif, lesbian, liar secara seksual dan menyalahi moral (Peletz 2012; Wieringa 1992; 2002; 2003; 2011). Perempuan baik-baik adalah mereka yang berseberangan dengan Gerwani. Stigmatisasi Gerwani oleh pemerintah Orde Baru sukses karena banyak perempuan Indonesia bungkam, apolitis, terdomestikasi dan tertaklukkan, tidak kritis terhadap pemerintah. Mereka mengalami amnesia sejarah. Para perempuan Indonesia menginternalisasi narasi sejarah yang diproduksi pemerintah dan bahkan berpartisipasi dan turut andil dalam menyebarkan cerita sejarah. Mereka menaturalisasi peran perempuan dan menanamkan kebencian terhadap Gerwani yang dikenal sebagai kelompok perempuan yang memainkan peran berbeda dari harapan dan kampanye serta propaganda negara (Irawaty 2016). Pemerintah, menurut saya memainkan permainan politik pecah belah (*the politics of divide*) di antara para perempuan untuk menghakimi

kelompok perempuan yang progresif, lebih aktif dan vokal terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tidak ramah perempuan dan dalam melawan pemerintah yang korup atau mereka yang kritis terhadap ideologi gender dan politik pemerintah.

### **Industrialisasi, Developmentalisme dan Neoliberalisme**

Indonesia mengalami proses industrialisasi modern sejak tahun 1960-an dan Soeharto sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai Bapak Pembangunan untuk menciptakan citra bahwa ia sangat peduli dengan pembangunan Indonesia untuk kemajuan negara dan perbaikan hidup rakyatnya. Selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto adalah pendukung utama developmentalisme dan modernisasi ekonomi (Eklof 1999). Pemerintahannya dilandaskan atas komitmen pada retorika trilogi pembangunan, persamaan dan stabilitas (Hill & Mackie 1994). Soeharto menciptakan model *state-nation building* berdasarkan konsep dan simbol keluarga beserta nilai-nilainya untuk membuat orang berpikir bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Indonesia (Vatikiotis 1998) sebagai bagian dari modus kontrol kekuasaan. Meroketnya harga minyak (*the oil boom*) pada pertengahan 1970-an memberikan pemerintah akses terhadap sumber daya keuangan yang memberikan negara posisi dan kekuasaan untuk mengontrol dan membangun ekonomi politik dalam negeri berdasarkan *“the politics of exchange and trade”* di mana *rewards* ekonomi ditukar dengan loyalitas politik dari warga negara (Eklof 1999). Soeharto mengklaim rezim dan melegitimasi pemerintahannya melalui propaganda pembangunan ekonomi (Murphy 1999). Ekonomi Indonesia dibangun dengan landasan pertumbuhan dan perkembangan ekspor minyak, selain produksi padi di sektor agrikultur. Harga minyak mengalami kolaps pada tahun 1986 bersamaan dengan devaluasi rupiah yang menghasilkan penurunan *revenue* yang kemudian memaksa pemerintah untuk menerima *structural adjustment loans* yang disodorkan IMF dan World Bank. Konsekuensinya, Indonesia harus mengikuti kebijakan pasar dan perdagangan yang harus selalu siap didikte oleh agen internasional sebagai bagian dari perjanjian untuk mendapatkan pinjaman.

Ketika harga minyak mengalami kemerosotan drastis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada awal 1980-an dan tentu saja hal ini memberi pengaruh buruk bagi perkembangan ekonomi Indonesia dan peningkatan taraf hidup rakyat. Negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lambat, peningkatan pengangguran, penurunan investasi

dan perdagangan, utang yang semakin meningkat, tantangan fiskal bagi pemerintah (Van Zanden 2012; Thorbecke 1992; Thee 2002). Indonesia kehilangan *revenue* paling penting yang berasal dari minyak karena penurunan harga minyak selama pertengahan 1980-an (Riwanto 1999). Hal ini memberikan dampak besar dan buruk bagi negara. Kehilangan *revenue* penting menggiring pemerintah Indonesia untuk menggeser arah kekuasaan melalui teknokrasi yang mendukung strategi yang mengarah ke ekspor dan mempromosikan industri teknologi rendah dan upah murah seperti tekstil berbarengan dengan liberalisasi, investasi, dan industrialisasi (Murphy 1999).

Industrialisasi bergantung pada sumberdaya manusia terutama dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Sejak 1970-an, ketersediaan tenaga kerja di manufaktur mengalami penurunan akibat dari konsentrasi industri di wilayah perkotaan, yang memberikan kesempatan bagi para pencari kerja dalam sektor ini (Donges, Stecher & Wolter 1974). Mengikuti penurunan harga minyak, pemerintah mengubah strategi ekonomi dan agenda pembangunan kearah industrialisasi yang lebih berorientasi ekspor di bawah kondisi pasar bebas (*free trade*) (Thee 2002; Soegijoko 1993) dengan mengikuti logika neoliberalisme. Pemerintah mulai meningkatkan daya saing internasional melalui ekspor non-migas (Thee 2002). Dalam periode ini, mengeksport tenaga kerja, terutama buruh perempuan, menjadi alternatif bagi pemerintah sebagai jalan pintas dan cepat mengeluarkan Indonesia dari krisis. Menurut Hugo (1995), sejak 1983 buruh migran perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga mengalami peningkatan cukup signifikan. Perempuan "dikorbankan" untuk "menyelamatkan" negara dari devaluasi ekonomi dengan dituntut untuk memenuhi tugas dan perannya sebagai perempuan warga negara sebagai wujud nasionalisme dan patriotismenya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ideologi gender negara. Pertumbuhan industri berdasarkan perkembangan perusahaan-perusahaan "modern" yang berorientasi ekspor mendorong perempuan meninggalkan produksi tradisional seperti *handicrafts* dan pekerjaan agrikultur untuk bekerja di pabrik atau perusahaan manufaktur (Wolf 1993) atau bekerja di luar negeri sebagai buruh migran, utamanya pekerja rumah tangga. Kedua sektor tersebut dianggap sebagai *unskilled labor*; mereka harus menjalankan pekerjaan berat dengan gaji murah, jam kerja yang panjang, tanpa asuransi kesehatan dan jaminan keselamatan, dan lain-lain (Irawaty 2011).

Di samping pola industrialisasi dan dorongan pemerintah, alasan lain perempuan bermigrasi ke daerah perkotaan untuk bekerja di pabrik atau bekerja di luar negeri adalah diperkenalkannya Revolusi Hijau (*Green Revolution*) yang menyebabkan perempuan kehilangan pekerjaannya di sektor agrikultur. Revolusi hijau diinisiasi tahun 1960-an melalui program intensifikasi massal di bawah Soeharto sebagai proyek berkelanjutan yang diwariskan sejak presiden sebelumnya. Proses ini mengambil alih pekerjaan perempuan di sektor agrikultur karena pemerintah menggantikan alat-alat pertanian tradisional dengan alat-alat dan teknologi yang lebih canggih (Wolf 1993, h. 136) yang membuat perempuan terpinggirkan karena tidak menguasai alat-alat tersebut dan tidak dapat menggunakannya. Akses terhadap informasi dan pengetahuan mengenai penggunaan alat-alat tersebut juga jauh dari otoritas perempuan. Perempuan disingkirkan dan tersingkirkan. Penggunaan teknologi dan mesin ini merupakan strategi pemerintah untuk hasil yang lebih produktif.

Sejak jatuhnya harga minyak, Indonesia harus berpikir keras mencari cara memecahkan masalah ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengirim tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Pada masa Soeharto, negara dan warga negara disimbolkan keluarga. Oleh karena itu, perempuan harus bertanggung jawab atas persoalan negara agar kebutuhan keluarganya terutama anak-anaknya, anak-anak bangsa, dapat terpenuhi serta untuk mendongkrak devisa negara melalui remitansi. Perempuan adalah yang didorong untuk bekerja sebagai buruh murah sebagai cara mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan krisis ekonomi. Sassen (2004, h. 258) menyebut situasi pemberian beban tanggung jawab pada perempuan ini dengan "feminization of survival." Rezim Orde Baru mendorong dan bahkan menuntut perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam proyek pembangunan nasional atas dasar propaganda memberikan perempuan kesempatan agar lebih independen, emansipatif dan liberatif secara sosial dan ekonomi. Namun, pada saat bersamaan, perempuan harus mengikuti citra dan narasi nasionalisme dan pembangunan yang dipropagandakan negara (Enloe 1990; Korteweg & Yurdakul 2014; Yuval-Davis 1997; Pateman 1988; Ahall 2012). Negara mempropagandakan dua kebijakan terkait dengan politik gender, yaitu berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi ibu dan istri yang baik yang selalu berada di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan mengabdikan pada suami.

## Agenda Pembangunan dan Ekspor Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Menurut Lindquist (2010, h. 119), di Indonesia, migrasi internasional menjadi elemen yang cukup penting dan strategi yang potensial bagi pembangunan nasional sejak awal tahun 1980-an baik bagi perluasan pasar tenaga kerja maupun akses ke kapital asing. Pemerintah mengirimkan buruh migran perempuan sebagai pekerja rumah tangga ke beberapa negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Pemerintah bahkan mengizinkan agen privat Arab Saudi langsung merekrut para pekerja dari Indonesia (Lindquist 2010, h. 119). Di samping remitansi, pemerintah juga mendapatkan keuntungan ekonomi melalui agen broker dan bahkan institusinya sendiri untuk mengatur, merekrut, dan “mendistribusikan” tenaga kerja. Broker atau agen rekrutmen merupakan bagian dari sistem dan struktur pemerintah atau sistem patronase yang disponsori negara (Lindquist 2010, h. 117).

Soeharto menggunakan ide tentang modernisme dan pembangunan nasional untuk mengontrol perempuan agar menjadi warga negara yang patuh, tidak protes dan membangkang dan bahkan menjadi pendukung negara. Untuk itu perlu mengontrol para istri dan ibu agar loyal terhadap pemerintah dengan menggunakan ideologi gender negara tentang perempuan yang baik yang memainkan peran sebagai ibu dan istri yang baik (Pateman 1988; Enloe 1990). Perempuan menjadi target disiplin dari para suaminya, ayahnya, dan bila mereka bekerja menjadi target disiplin dari majikannya melalui tubuh dan tenaganya sebagai buruh. Yeates (2014) menggunakan studi Wallerstein dan Smith (1992) dalam analisisnya tentang proses industrialisasi modern yang menguntungkan negara dan struktur patriarki lokal dan sistem hubungan buruh yang informal. Yates menegaskan bahwa dalam industrialisasi global, buruh perempuan mengalami super eksploitasi dibandingkan buruh laki-laki. Dalam rantai komoditas di negara berkembang, buruh perempuanlah yang paling tereksplorasi dalam sistem pembagian kerja secara internasional atau pembagian kerja reproduksi secara internasional.

Menurut Postel-Coster (1993), Pemerintah Indonesia berusaha menunjukkan komitmen politik untuk meningkatkan situasi hidup perempuan dengan menjadikan mereka sebagai alat pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Hanya saja, dalam prosesnya, perempuan ditinggalkan dalam semua pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan pembangunan. Sejak tahun 1970-an, perempuan hanya dilihat sebagai *human resources* yang perlu diintegrasikan

ke dalam pembangunan. Peran perempuan dilihat sebagai bagian dari kontribusinya terhadap keluarga, masyarakat dan negara untuk melayani dan mengabdikan kepada negara melalui proses pembangunan. Sebagai bagian dari peran perempuan dalam pembangunan yang seolah-olah diberikan negara, perempuan harus mendukung kebijakan dan regulasi negara seperti ideologi gender negara dalam mengampanyekan peran perempuan sebagai ibu dan istri yang baik. Beberapa organisasi nasional perempuan seperti misalnya Dharma Wanita dan PKK, mendukung kebijakan pemerintah berkaitan dengan tugas-tugas perempuan utamanya dalam hal fungsi reproduksi (Postel-Coster 1993).

Remitansi dari buruh migran yang bekerja di luar negeri merupakan sumber pemasukan penting negara. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor buruh yang cukup signifikan di wilayah Asia dan praktik ini merupakan bagian dari kebijakan perburuhan Indonesia sebagaimana dinyatakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Rudnyckij 2004; Hugo 1995). Indonesia menjadi salah satu negara pengeskor buruh migran terbesar di dunia dengan estimasi 2,6 juta warga negaranya bekerja di luar negeri (Rudnyckij 2004). Rudnyckij (2004, h. 409) mengutip Jacob Nuwawea, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2001-2004, di *Jakarta Post*, “Pemerintah akan terus fokus pada dua strategi mengatasi pengangguran, yaitu mengekspor pekerja rumah tangga dan memaksimalkan industri rumah tangga.” Buruh migran merupakan hal yang krusial bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi yang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta.

Abdul Latief, juga salah satu Menteri Tenaga Kerja pada masa Soeharto, menegaskan, ide untuk mengeskor pekerja rumah tangga merupakan masukan dan kontribusi departemennya bagi Repelita VI (1994-1999) dan rencana pembangunan jangka panjang kedua (PJPT 1994-2018). Ada enam prioritas yang menjadi fokus program “Ekspor Layanan Tenaga Kerja,” yaitu 1) program ekspor tenaga kerja merupakan bagian dari agenda ketenagakerjaan nasional, 2) kebutuhan untuk mekanisme agar ekspor tenaga kerja bisa benar-benar menghasilkan keuntungan negara secara maksimal, 3) kebutuhan untuk membuat mekanisme perekrutan tenaga kerja secara layak, 4) kebutuhan memberikan perlindungan pada para buruh migran, 5) kebutuhan membuat aturan terkait rekrutmen, penyediaan pelatihan, penempatan, dan pemulangan tenaga kerja, dan 6) orientasi peningkatan tenaga kerja migran di sektor formal dan pengurangan tenaga kerja di sektor

informal secara bertahap hingga akhir Repelita VI (Hugo 1995). Pemerintah menargetkan pada Repelita VI untuk mengirim 1,25 juta pekerja migran menjadi kebutuhan atau *demand* yang cukup tinggi daripada pekerja migran laki-laki sejak 1983-1995. Mayoritas perempuan tersebut bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah tangga di Timur Tengah dan juga di Malaysia, Singapura dan Hong Kong.

Indonesia mendirikan *Indonesian Manpower Supply Association* (IMSA), agen perekrut tenaga kerja yang mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menjadi broker atau perantara antara pekerja dan negara tujuan untuk membuat regulasi buruh migran yang bekerja di Timur Tengah tahun 1981. Pada periode ini, Indonesia mempunyai kelebihan tenaga kerja (*labor surplus*) dan migrasi menjadi cara untuk menyelesaikan masalah menurut Repelita (1984/1985-1988/1989). Rencana ini mempunyai target untuk mengirim 225.000 pekerja ke luar negeri yang merupakan strategi ekonomi yang cukup kentara dan jelas dengan cara mempromosikan pengeksporan pekerja rumah tangga perempuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagai solusi nasional sementara (Tirtosudarmo 1999; Loveband 2006; Gutierrez-Rodriguez 2014). Hal ini juga memberikan keuntungan bagi negara melalui devisa dari remitansi yang dikirimkan pekerja migran tersebut dan menjadi cara untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh jatuhnya harga minyak. Keuntungan besar juga didapat para broker dan agen perekrut buruh migran yang bisnisnya menjadi besar.

Pertumbuhan pekerja rumah tangga kemudian menjadi bisnis bagi para perekrut dan negara dengan memanfaatkan kerentanan mereka sebagai pekerja dan perempuan. Mereka menjadi sasaran dan target kekerasan dan penipuan, eksploitasi pada setiap tahapan dalam proses migrasi. Mereka bisa dijebak menjadi pekerja "illegal" (*undocumented migrant*) (Abdul Rahman 2005). Mereka harus menunggu untuk waktu yang cukup lama sebelum ditempatkan bekerja di rumah majikan mereka, sambil terus membayar ke perekrut atau broker untuk biaya tempat tinggal dan akomodasi. Banyak studi mengkritik pemerintah Indonesia yang tidak membuat kebijakan khusus untuk melindungi para pekerja di luar negeri. Indonesia sering dilihat sebagai negara lemah dan tidak mempunyai keberanian dan kekuasaan terutama dalam proses negosiasi untuk kebutuhan kerjasama bilateral (Abdul-Rahman 2005).

Pemerintah Indonesia tidak mempunyai keinginan politik (*political will*) untuk menyelesaikan persoalan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap

buruh migran Indonesia terutama yang dialami oleh para pekerja rumah tangga migran di negara tujuan tetapi lebih fokus terhadap keuntungan yang didapat. Satu strategi "ampuh" yang digunakan pemerintah adalah meninabobokan mereka dengan sebutan pahlawan devisa yang membuat mereka seolah-olah pahlawan yang dielu-elukan dan menunjukkan bahwa negara memerhatikan dan respek terhadap mereka. Akan tetapi yang terjadi sesungguhnya hanya untuk membuat mereka terlena dengan sebutan tersebut dan membiarkan mereka tanpa perlindungan hukum. Konsep tersebut dijadikan alat untuk memanipulasi kesadaran para perempuan dari daerah yang menjadi pekerja rumah tangga di samping mempromosikan konsep tanggung jawab warga negara dan nasionalisme.

Loveband (2006) juga mempunyai analisis serupa mengenai pemanfaatan kerentanan pekerja rumah tangga migran dengan mengangkat mereka menjadi pahlawan devisa atau pahlawan remitansi yang mencari pekerjaan di luar negeri melalui perekrut tenaga kerja dari pemerintah. Sementara itu para buruh tersebut harus membayar sejumlah uang yang dipotong dari gaji mereka untuk membayar biaya "training" yang disyaratkan agen dan pemerintah yang seringkali hanya formalitas belaka. Loveband juga menunjukkan bagaimana pekerja rumah tangga mengalami eksploitasi ganda. Elmhirst (1999) mengangkat isu kontradiksi dengan mengatakan bahwa rencana pembangunan negara mempunyai kecenderungan untuk mendorong sebanyak-banyaknya perempuan untuk berpartisipasi menjadi buruh migran sebagai pekerja rumah tangga yang menjadi bagian dari berpartisipasi dalam proyek pembangunan pemerintah tetapi memosisikan mereka tetap *invisible* dalam hal pembuatan kebijakan. Mereka tidak diperlakukan sebagai tenaga kerja formal, hanya sekadar aktivitas ekonomi informal, yang tidak termasuk dalam sensus tenaga kerja dan tidak dilindungi dalam legislasi tenaga kerja.

Soeharto mempunyai kebijakan pembangunan yang liberal, yaitu *women-in-development*, yang mendorong perempuan untuk ambil bagian dalam pasar tenaga kerja, proses pembangunan dan proyek pembangunan negara (Elmhirst 1999). Akan tetapi, bagi perempuan yang telah menikah, tentu saja mereka tidak begitu saja dibebaskan dari tugas sebagai istri apalagi bila mempunyai anak. Mereka diharapkan harus bisa menjadi "super mom" yang bisa mengerjakan semuanya (*multiple roles*) bila tidak ingin mendapat label dan cibiran dari masyarakat dan keluar dari arus utama dan narasi yang diciptakan negara. Tentu saja banyak perempuan yang

kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Masyarakat dan negara berhasil mereproduksi dan menyebarkan "perasaan bersalah" (*guilty feelings*) bila mereka harus meninggalkan anak-anaknya bekerja karena mereka dianggap menelantarkan anak-anak mereka dan juga suami dengan lebih memprioritaskan pekerjaan. Mereka harus menanggung stigma dari masyarakat, anggota keluarga, teman, kerabat dan media. Mendorong perempuan untuk bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarganya berarti bertentangan dengan ideologi gender negara tentang *motherhood*, *state ibuisism* dan *wifeism*. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas dilema yang dihadapi buruh migran perempuan apalagi salah satu pekerjaan mereka sebagai pekerja rumah tangga adalah menjaga anak majikan, sementara mereka rela meninggalkan anak-anak mereka untuk mencari rezeki di negeri orang. Pemerintah menciptakan paradoks dan kontradiksi tersebut. Ketika menyangkut soal pembangunan ekonomi nasional, pemerintah menerapkan standar ganda terhadap politik gender yang dijalankan, seolah-olah tidak menjadi masalah ketika para perempuan pekerja migran tersebut tidak mengurus keluarganya seperti yang dikampanyekan negara. Namun, di sisi lain, negara lepas tangan ketika mereka dicemooh dan dicibir karena meninggalkan keluarga. Mereka juga disebut sebagai pahlawan devisa, tapi di sisi lain, mereka tidak dilindungi sebagai pekerja, sebagai perempuan, bahkan sebagai warga negara. Bila perempuan berpartisipasi dalam pembangunan sebagai bagian dari agenda pemerintah dengan cara bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran, berdasarkan ideologi gender tradisional yang dikampanyekan negara, hal itu berarti perempuan harus "menelantarkan atau mengabaikan" keluarga, anak-anak dan suami dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan mengurus keluarganya seperti ekspektasi dan agenda negara.

Menurut Manderson (1983) konsep modernisasi di Indonesia berasal dari negara-negara Barat yang membatasi emansipasi dan partisipasi perempuan di wilayah publik yang membuat perempuan kehilangan kontrol dan otonominya sendiri serta kekuatan karena mereka selalu didikte dan dikontrol oleh negara dan kapitalisme global, termasuk tenaga kerja mereka, seksualitas, tubuh dan sikap serta tingkah laku mereka agar menjadi ibu dan istri yang baik. Sejak awal modernisasi, industrialisasi dan proses pembangunan selalu diarahkan langsung ke pembangunan ekonomi yang selalu melihat sesuatu bernilai sebagai komoditas, properti yang memberikan keuntungan ekonomi negara, teknokrat dan kelas menengah atas atau kelompok

pendukung negara dan yang berkonspirasi dengan negara. Soegijoko (1993, h. 69) menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi rencana nasional, untuk meningkatkan produksi nasional, mencapai pertumbuhan dan perluasan tenaga kerja yang cepat dan mengontrol populasi melalui program keluarga berencana. Krisis yang mengikuti penurunan harga minyak dan krisis Asia yang menghantam Indonesia, membuat Indonesia terpuruk hebat. *Structural Adjustment Programs* sebagai paket komplis yang ditawarkan neoliberalisme dalam bentuk pinjaman dari IMF dan World Bank menyebabkan penderitaan yang dialami masyarakat seperti utang, privatisasi, dan pengurangan subsidi publik. Buruh migran, terutama perempuan dilihat sebagai *panacea* seperti disebutkan Sassen (2004, h. 258) sebagai cara untuk memberikan keuntungan, jalan keluar masalah ekonomi dan negara sekaligus penghasil remitansi. Sassen berargumen bahwa cara ini menjadi populer yang digunakan negara untuk menyelesaikan masalah keuangan, krisis dan pembangunan dan terjadilah yang ia sebut sebagai *feminization of survival* yakni banyak keluarga, rumah tangga, komunitas dan bahkan negara tergantung pada usaha dan upaya "survival" perempuan untuk berjuang bertahan dan melanjutkan hidupnya.

## Penutup

Sekitar 32 tahun, Soeharto membangun kekuasaan yang sangat solid dengan menerapkan dua strategi: stabilisasi politik yang diikuti dengan developmentalisme. Politik gender (dan seksualitas) berperan penting dalam stabilisasi politik Soeharto, yaitu dengan mempromosikan dan mengkampanyekan ideologi gender tradisional maternalisme yang dikenal dengan *state ibuisism*. Soeharto memproduksi citra sosial, politik dan budaya tentang *ideal womanhood and motherhood*: perempuan yang tinggal di rumah untuk mengedukasi dan merawat anak-anaknya, mengurus rumah tangga dan mengurus semua kebutuhan suami dan keluarga serta patuh terhadap suami. Perempuan diasumsikan sebagai pilar bangsa, dengan tugas pembentukan dan persiapan generasi terbaik bangsa. Mereka yang meninggalkan rumah dan mengabaikan tugas-tugas domestik ini, dan terlibat dalam kerja publik dan politik, akan dilabeli sebagai perempuan tidak baik yang tidak layak dicontoh dan merupakan ancaman bagi bangsa dan negara.

Soeharto menerapkan politik gender lain untuk mendukung proyek developmentalismenya, yang justru kontradiktif dengan politik gender tradisional

maternalismenya. Mengikuti *booming* industri konstruksi dan pabrik di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Soeharto mendorong dan mendukung perempuan untuk meninggalkan rumah demi mendukung agenda industrialisasi nasional sebagai buruh murah. Dengan propaganda gender yang sama tentang kontribusi perempuan terhadap pembangunan bangsa dan negara, Soeharto mendorong perempuan untuk secara aktif berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, migrasi domestik membuka pintu bagi migrasi internasional juga di bawah dukungan negara. Banyak perempuan, terutama dari wilayah perdesaan mengikuti arus gelombang migrasi internasional untuk bekerja di luar negeri seperti Timur Tengah dan negara-negara Asia yang lebih maju untuk menjadi pekerja rumah tangga dengan tawaran pendapatan yang cukup menggiurkan meski harus berpisah dan terpisah dengan keluarga. Soeharto mendukung dan mengampanyekan jenis migrasi perempuan atau program mengeksport tenaga kerja perempuan murah sejak pemerintahannya memperoleh keuntungan ekonomi yang terbilang sangat besar; hal ini juga “menyelamatkan” agenda developmentalismenya sekaligus menyelamatkan negara dari krisis dan kemelut ekonomi.

Kedua model politik gender Soeharto seperti yang dideskripsikan di atas membuat perempuan menjadi target subordinasi dalam agenda politik negara. Namun, di banyak kasus, hal ini justru menjadi “*blessing in disguise*.” Propaganda politik ini memunculkan respons perempuan yang menekankan pada kesadaran dan sensitivitas gender dengan melihat perempuan Indonesia tidak melulu sebagai target pasif dari politik gender negara. Untuk merespons maternalisme tradisional negara atau ibuisme, beberapa kelompok perempuan mempromosikan *progressive motherhood*, yang membawa ide tentang “*the personal is political*”. Sebagian perempuan dapat memilih dan memutuskan untuk tinggal di rumah namun pada saat yang bersamaan mereka juga bisa memainkan peran politik penting. Sementara, bagi sebagian perempuan migrasi menjadi pengalaman penting bagi para pekerja rumah tangga sebagai pengalaman *self-empowering* dalam berbagai aspek, seperti, personal, sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya. Mereka bukan hanya menjadi korban pasif, permisif dan diam tanpa melakukan apapun terhadap eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan yang banyak menimpa mereka sebagaimana yang sering digambarkan oleh banyak media dan bahkan hasil penelitian, tapi mereka dapat menunjukkan agensi, kekuatan dan resistensinya dengan berbagai cara dan strategi dan caranya masing-masing, baik individual maupun kolektif. Bagi perempuan buruh migran, politik

gender baik untuk stabilisasi politik dan sebagai bagian dari proyek developmentalisme bukan hanya merupakan pengalaman submisif, tetapi juga pemberdayaan dan agensi.

## Daftar Pustaka

- Abdul-Rahman, N 2005, *Shaping the Migrant Institution: The Agency of Indonesian Domestic Workers in Singapore*, Marshall Cavendish Academic, Beijing, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore.
- Ahall, L 2012, “Motherhood, Myth and Gendered Agency in Political Violence”, *International Feminist Journal of Politics*, vol. 14, no. 1, hh. 103-120.
- Anderson, B 1991, *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, Verso, London & New York.
- Anderson, B 2000, *Doing the Dirty Work: The Global Politics of Domestic Labour*, Zed Books, London & New York.
- Anggraeni, D 2006, *Dreamseekers: Indonesian Women as Domestic Workers in Asia*, Equinox, Jakarta, Singapore.
- Anthias, F & Yuval-Davis, N (eds.) 1989, *Woman-Nation-State*, Macmillan, Hampshire and London.
- Blackburn, S 2004, *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Blackwood, E 2005, “Gender Transgression in Colonial and Postcolonial Indonesia”, *The Journal of Asian Studies*, vol. 64, no. 4, hh. 849-879.
- Boserup, E 1970, *Women's Role in Economic Development*, Earthscan Publications, London.
- Constable, N 2007, *Maid to Order in Hong Kong: Stories of Migrant Workers*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- Donges, JB, Stecher, B & Wolter, F 1974, *Industrial Development Policies for Indonesia*, J.C.B. Mohr, Berlin.
- Elmhirst, R 1999, “Learning the Ways of the Priyayi’: Domestic Servants and the Mediation of Modernity in Jakarta, Indonesia”, dalam JH Momsen (Ed.), *Gender, Migration and Domestic Service*, Routledge, London, New York.
- Eklof, S 1999, *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Soeharto 1996-98*, NIAS (Nordic Institute of Asian Studies), London.
- Enloe, C 1990, *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
- Foucault, M 1995, *Discipline & Punish: The Birth of the Prison*, Vintage Books, New York.
- Grijns, M 1987, “Tea-Pickers in West Java as Mothers and Workers: Female Work and Women's Jobs”, dalam E Locher-Scholten & A Niehof (Eds.), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, Foris Publications, Dordrecht-Holland and Providence.
- Gutierrez-Rodriguez, E 2014, “Domestic Work-Affective Labor: On Feminization and the Coloniality of Labor”, *Women's Studies International Forum*, vol. 46, hh. 45-53.

- Hill, Hal & Mackie, J 1994, "Introduction", dalam H Hill (ed), *Indonesia's New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, University of Hawaii Press, Honolulu, hh. xxii-xxviii.
- Hochschild, A & Machung, A 1989, *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home*, Viking, New York.
- Hugo, G 1995, "Labor Export from Indonesia: An Overview", *ASEAN Economic Bulletin*, vol. 12, no. 2, hh. 275-298.
- Irawaty, D 2016, "The Contestation and The Politics of Material and Memorial Objects of the 1965 Tragedy in Indonesia", *Etnohistori*, vol. 2, no. 1, hh. 1-24.
- Irawaty, D 2011, *Redefining Cultural Practices and Reconstructing a Colonial Legacy: Foundations for Female Household Workers' Empowerment in Indonesia*, Dr Verlaag, Berlin.
- Thee, KW 2002, "The Soeharto Era and After: Stability, Development and Crisis, 1966-2000" dalam H Dick (ed.), *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*, Asian Studies Association of Australia and University of Hawaii Press Honolulu, Honolulu and Sydney.
- Korteweg, A & Yurdakul, G 2014, *The Headscarf Debates: Conflicts of National Belonging*, Standford University Press, Standford.
- Lan, PC 2006, *Global Cinderellas: Migrant Domestic Workers and Newly Rich Employers in Taiwan*, Duke University Press, Durham and London.
- Lim, LL & Oishi, N 1996, "International Labor Migration of Asian Women: Distinctive Characteristics and Policy Concerns", *Asia Pacific Migration*, vol. 5, no. 1, hh. 85-116.
- Lindquist, J 2010, "Labour Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry", *Pacific Affairs*, vol. 83, no. 1, hh. 115-132.
- Loveband, A 2006, "Positioning the Product: Indonesian Migrant Women Workers in Taiwan", dalam K Hewison & K Young (eds.), *Transnational Migration and work in Asia*, Routledge, London and New York.
- Manderson, L 1983, *Women's Work and Women's Roles: Economics and Everyday Life in Indonesia, Malaysia and Singapore*, The Australian National University, Melbourne and New York.
- Martyn, E 2005, *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia*, Routledge, London and New York.
- Mies, M 1982, *The Lace makers of Narsapur: Indian Housewives Produce for the World Market*, Zed Press, London.
- Mies, M 1998, *Patriarchy & Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor*, Zed Books London & New York.
- Murphy, AM 1999, "Indonesia and Globalization", *Asian Perspective*, vol. 23, no. 4, hh. 229-259.
- Parrenas, RS 2015, *Servants of Globalization: Migration and Domestic Work*, Standford University Press, Standford.
- Pateman, C 1988, *The Sexual Contract*, Standford University Press, Standford.
- Peletz, MG 2012, "Gender, Sexuality, and the State in Southeast Asia", *The Journal of Asian Studies*, vol. 71, no. 4, hh. 895-917.
- Phillips, A & Taylor, B 1980, "Sex and Skill: Notes towards a Feminist Economics", *Feminist Review*, vol. 6, hh. 79-88.
- Postel-Coster, E 1993, "The Instrumentality of Indonesia's policy toward Women", dalam JP Dirkse, F Husken & M Rutten (eds.), *Development and Social Welfare: Indonesia's Experience under New Order*, KITLV Press, Leiden.
- Robinson, K 2008, *Gender, Islam, and Democracy in Indonesia*, Routledge, London.
- Romero, M 1992, *Maid in the U.S.A.*, Routledge, New York & London.
- Rudnyckyj, D 2004, "Technologies of Servitude: Governmentality and Indonesian Transnational Labor Migration", *Anthropological Quarterly*, vol. 77, no. 3, hh. 407-434.
- Sassen, S 2004, "Global Cities and Survival Circuits", dalam B Ehrenreich & AR Hochschild (eds.), *Global Woman*, Metropolitan Books, New York.
- Sears, LJ (ed.) 1996, *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, Duke University Press, Durham & London.
- Soegijoko, BTS 1993, "Urban Growth, Industrial Development and Migration", dalam JP Dirkse, F Hüsken & M Rutten (eds.), *Indonesia's Experiences under the New Order*, KITLV Press, Leiden.
- Suryakusuma, J 1996, "The State and Sexuality in New Order Indonesia", dalam LJ Sears (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, Duke University Press, Durham & London.
- Thorbecke, E 1992, *Adjustment and Equity in Indonesia*, Development Centre of the Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris.
- Tirtosudarmo, R 1999, "The Indonesian State's Response to Migration", *Sojourn*, vol. 14, no. 1, hh. 212-228.
- Vatikiotis, MRJ 1998, *Indonesian Politics under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*, Routledge, London & New York.
- Wieringa, S 1992, "Ibu or the Beast: Gender Interests in Two Indonesian Women's Organizations", *Feminist Review*, vol. 41, hh. 98-113.
- Wieringa, S 2002, *Sexual Politics in Indonesia*, Palgrave Macmillan and ISS Institute of Social Studies, New York, Amsterdam.
- Wieringa, S 2003, "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism", *Journal of Women's History*, vol. 15, no. 1, hh. 70-91.
- Wieringa, S 2011, "Sexual Slander and the 1965/66 Mass Killings in Indonesia: Political and Methodological Considerations", *Journal of Contemporary Asia*, vol. 41, no. 4, hh. 544-565.
- Wolf, DL 1993, "Women and Industrialization in Indonesia", dalam JP Dirkse (ed.), *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under the New Order*, KITLV Press, Leiden.
- Yeates, N 2014, "Global Care Chains. Bringing in Transnational Reproductive Laborer Households", dalam WA Dunaway (ed.), *Gendered Commodity Chains: Seeing Women's Work and Households in Global Production*, Standford University Press, Standford.
- Yuval-Davis, N 1997, *Gender and Nations*, Sage, New York, London.
- Yamanaka, K & Piper, N 2005, "Feminized Migration in East and Southeast Asia: Policies, Actions and Empowerment", *Occasional Paper*, vol. 11, UNRISD, Ottawa, Canada.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
5. Tracy Wright ebster, PhD (University of Western Australia)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Universitas Gadjah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
8. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB,  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

